

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Tagihan PBB Terkendala NOP Ganda

Entitas / Cakupan : Kota Bekasi

Sumber / Hal : Media Indonesia/Hal. 13

Edisi : Kamis, 29 November 2018

BEKASI

Tagihan PBB Terkendala NOP Ganda

RATUSAN nomor objek pajak (NOP) ganda ditemukan di Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Saat tengah memverifikasi pajak bumi dan bangunan (PBB), petugas kecamatan menemukan 814 NOP ganda dari 14 ribu wajib pajak yang menjadi target piutang PBB.

“Adanya NOP ganda itu baru kita ketahui saat surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB kami bagikan ke para wajib pajak,” ungkap Camat Medan Satria, Taufiq Rahmat, kemarin.

Pelibatan camat untuk menagih piutang PBB tak lepas dari kondisi APBD 2018 Kota Bekasi yang tengah mengalami defisit. Tertagihnya PBB yang selama ini tertunggak diharapkan bisa menambal APBD 2018.

“Tapi, saat kita bagikan SPPT ke warga, di situ ditemukan adanya NOP ganda. Ada 814 NOP ganda,” ucap Taufiq.

Data NOP itu, ujarnya, didapatnya dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi. “Saya dapat data itu gelontoran di tahun

2013 silam,” ujarnya.

Data yang diterimanya itu, sambungnya, rupanya belum diverifikasi Bapenda. Saat data diserahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak, Bapenda tidak lebih dulu memeriksanya sebelum diserahkan ke kantor camat.

Alhasil, ada potensi pendapatan daerah yang tak tertagih sekitar Rp3 miliar akibat 814 NOP ganda itu.

Adanya NOP ganda itu diakui Taufiq menyulitkan jajarannya untuk mengejar target pendapatan dari pajak. Apalagi saat ini di kecamatannya ada 14 ribu wajib pajak yang menjadi target piutang PBB dengan nilai Rp19 miliar.

“Temuan NOP ganda itu membuat upaya pengejaran piutang jadi terhambat. Menjelang akhir November, target piutang PBB baru teralisasi 19% saja, banyak kendala yang kami hadapi,” kata dia.

Taufiq menjelaskan, selain NOP ganda, petugas pun menemukan berbagai macam kendala. Beberapa di antaranya ialah alamat wajib pajak yang ti-

dak ditemukan, SPPT sudah pecah dari induk, dan status tanah yang masih bersengketa hukum.

Ia mengaku sudah melaporkan semua masalah itu pada Bapenda Kota Bekasi agar segera terselesaikan.

Di kesempatan itu, Taufiq menambahkan, rendahnya pencapaian piutang pajak juga lantaran kesadaran membayar pajak di masyarakat yang masih minim.

Verifikasi ulang

Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Bekasi Aan Suhanda menyampaikan, pihaknya saat ini masih berupaya mengejar target pendapatan dari sektor PBB. Meski penagihan piutang PBB masih mengalami kendala di lapangan, target pendapatan PBB murni saat ini sudah mencapai 93,36%.

“Kalau untuk target PBB murni, kami optimistis bisa mencapai target,” kata dia.

Aan menjelaskan, target pencapaian PBB murni ialah Rp340.500.000.000. Hingga 20 November 2018, baru tercapai sekitar Rp317.883.111.822 atau sekitar 93,36%.

Adapun untuk masalah NOP ganda, pihaknya akan memverifikasi ulang terhadap target PBB piutang sehingga besaran potensi bisa direvisi.

“Akan kita verifikasi lagi datanya. Saat ini petugas Kelurahan dan kecamatan masih melakukan operasi penyisiran di wilayah masing-masing,” tandas dia. (Gan/J-1)